



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
2024**

Jalan Jend. Sudirman No. 01 RT. 04 Kel. Melayu

Telp. (0541) 661158

Website : disperindag.kukarkab.go.id

E-mail : disperindag.kukarkab.go.id Kode Pos 75512

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 20 Februari 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	4
Tabel 1.1.....	4
Jumlah Pegawai.....	4
Tabel 1.2.....	5
Kualifikasi Pendidikan.....	5
Tabel 1.3.....	6
Pangkat dan Golongan.....	6
Tabel 1.4.....	6
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	6
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Disperindag Kab. Kukar.....	7
BAB II.....	8
PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Perencanaan Strategis.....	8
2.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	8
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	8
Tabel 2.1.....	9
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	9
2.4 Strategi.....	10
2.5 Arah Kebijakan.....	10
Tabel 2.2.....	10
Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
2.6 Program.....	11
Tabel 2.3.....	11
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	11
2.7 Perjanjian Kinerja.....	12
Tabel 2.4.....	12
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	12
BAB III.....	17
AKUNTABILITAS KINERJA.....	17

3.1 Capaian Kinerja.....	17
Tabel 3.1.....	18
Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	18
3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	18
Tabel 3.2.....	18
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	18
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya.....	21
Tabel 3.3.....	21
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja.....	21
Tahun Sebelumnya.....	21
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	23
Tabel 3.4.....	23
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	23
3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	23
Tabel 3.5.....	24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	24
Tabel 3.6.....	24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	24
3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	25
Tabel 3.7.....	28
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan.....	28
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	28
3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	29
Tabel 3.8.....	29
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	29
3.8 Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya (2023).....	32
Tabel 3.9.....	32
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan.....	32
Tahun Sebelumnya (2023).....	32
BAB IV.....	37
PENUTUP.....	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Perbaikan Kedepan.....	37



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

LKjIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kukar Tahun 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sekretaris
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Sarana dan Prasarana Sumber daya Industri
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sumber daya Industri
4. Bidang Promosi dan Informasi Industri
Kepala Bidang Promosi dan Informasi Industri
5. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
6. Bidang Pemasaran Produk dalam Negeri & Pengendalian Barang Pokok
Kepala Bidang Pemasaran Produk dalam Negeri & Pengendalian Barang Pokok
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
8. UPTD

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Beberapa isu strategis atau permasalahan yang dihadapi berdasarkan telaah yang telah dilakukan, oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Keunggulan potensi Industri dan perdagangan
2. Kolaborasi industri besar dan industri kecil menengah.
3. Penumbuhan ekonomi baru yang inovatif dan kreatif.
4. Adaptif terhadap perkembangan zaman dan penyesuaian terhadap era new normal
5. Era industri baru yaitu industri 4.0 dan Industri 5.0



1.5 Uraian Singkat Organisasi

Pegawai merupakan unsur pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan satuan Perangkat Daerah. Kekuatan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir Desember tahun 2024 memiliki pegawai sebanyak 107 Orang. Gambaran sumber daya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 tersaji dalam tabel – tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	25
2.	Bidang Sarana dan Prasarana Sumber daya Industri	11
3.	Bidang Bidang Promosi dan Informasi Industri	13
4.	Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi	35
5.	Bidang Pemasaran Produk dalam Negeri & Pengendalian Barang Pokok	23
TOTAL PEGAWAI		107

Sumber Data : Disperindag Kutai Kartanegara



Tabel 1.2
Kualifikasi Pendidikan

NO	BAGIAN/BIDANG	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	Sekretariat	2	-	13	1	8	1	26
2.	Bidang Sarana dan Prasarana Sumber daya Industri	-	-	6	1	3	1	12
3.	Bidang Bidang Promosi dan Informasi Industri	-	-	5	-	8	-	24
4.	Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi	5	-	21	-	9	-	13
5.	Bidang Pemasaran Produk dalam Negeri & Pengendalian Barang Pokok	-	-	8	2	10	3	39
TOTAL		7	0	53	4	38	5	107

Sumber Data : Disperindag Kutai Kartanegara

Tabel 1.3
Pangkat dan Golongan

NO	BAGIAN/BIDANG	PANGKAT DAN GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	2	10	12	1	25
2.	Bidang Sarana dan Prasarana Sumber daya Industri	-	6	4	1	11
3.	Bidang Bidang Promosi dan Informasi Industri	-	4	9	-	13
4.	Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi	5	21	9	-	35
5.	Bidang Pemasaran Produk dalam Negeri & Pengendalian Barang Pokok	-	10	10	3	23
TOTAL		7	51	44	5	107

Sumber Data : Disperindag Kutai Kartanegara

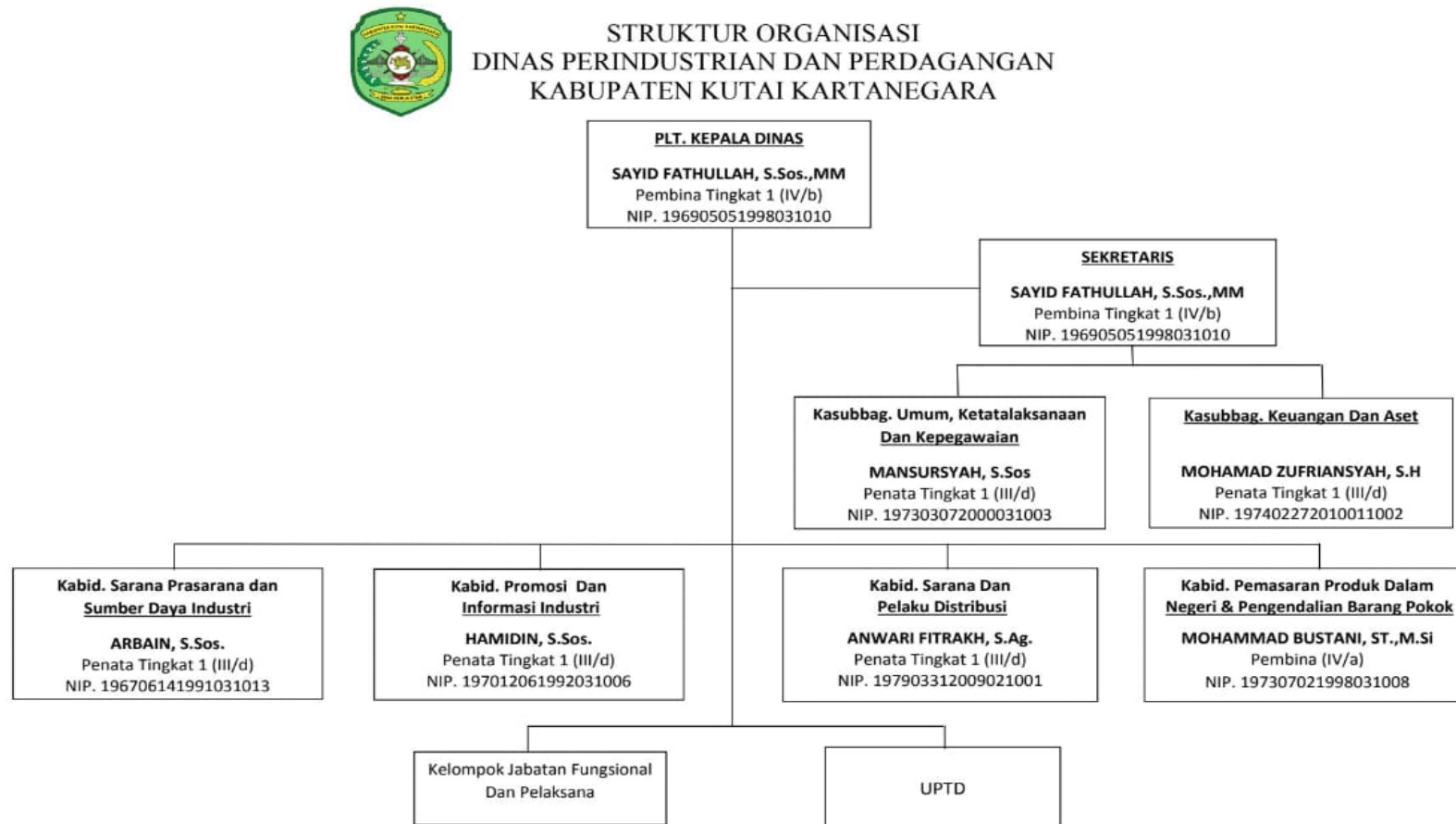
Tabel 1.4
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

NO	BAGIAN/BIDANG	PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL				
		Ess I	Ess II	Ess III	Ess IV	FUNGSIONAL
1.	Sekretariat	-	-	1	2	1
2.	Bidang Sarana dan Prasarana Sumber daya Industri	-	-	1	-	1
3.	Bidang Bidang Promosi dan Informasi Industri	-	-	1	-	2
4.	Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi	-	-	1	-	1
5.	Bidang Pemasaran Produk dalam Negeri & Pengendalian Barang Pokok	-	-	1	-	7
TOTAL		-	-	5	2	12

Sumber Data : Disperindag Kutai Kartanegara

Selain itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada akhir bulan Desember 2024 juga didukung oleh 79 Tenaga Harian Lepas (THL) Administrasi dan 92 orang Pegawai Harian Lepas (PHL).

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Disperindag Kab. Kukar



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Misi ke-3 yaitu *Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan



sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;	1. Meningkatkan Pertumbuhan sektor industri pengolahan	1. LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kategori Industri Pengolahan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan NonMigas
				Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan NonMigas
				Persentase Sentra IKM berbasisi Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif
	2. Meningkatkan akses dan tata kelola Perdagangan besar dan eceran	2. LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	2. Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)
				Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh ijin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi
				Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)
				Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e commerce / marketplace



2.4 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan dan struktur sektor industri kecil menengah berbasis keunggulan Daerah.
2. Penguatan penguasaan pasar dalam negeri dan luar negeri serta Jaringan Distribusi Barang
3. Penguatan layanan perdagangan yang tertib (niaga, mutu dan ukur) dan pemberdayaan konsumen

2.5 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Penguatan pembangunan dan struktur sektor industri kecil menengah berbasis keunggulan daerah	Peningkatan kemudahan dan pengawasan layanan terhadap perijinan
		Pengembangan basis data dan informasi perencanaan bidang industri
		Penguatan Kapasitas dan pembinaan Kompetensi SDM Industr
		Pengembangan Kawasan IKM yang terintegrasi dan berbasis produk unggulan daerah
2.	Penguatan penguasaan pasar dalam negeri dan luar negeri serta Jaringan Distribusi Barang	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran dengan pihak ketiga
		Penguatan jejaring perdagangan produk lokal melalui ekosistem offline dan perdagangan secara elektronik (ecommerce)
		Penguatan Fungsi dan Peran Pasar Daerah Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian daerah
		Fasilitasi kemudahan dan pendampingan kepada pelaku dalam legalitgas usaha/perijinan



3.	Penguatan layanan perdagangan yang tertib (niaga, mutu dan ukur) dan pemberdayaan konsumen	Optimalisasi pengawasan dan layanan metrologi serta perlindungan konsumen
		Penguatan Mekanisme pengawasan dan stabilisasi harga bahan pokok/ penting serta perlindungan konsumen

2.6 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	1.Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	2.Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	3.Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	
	1.Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
	2.Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	3.Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	4.Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Program Pengembangan Ekspor
	5.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen



2.7 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Persen	4,10
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	Persen	4,30
	Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	Persen	100
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Persen	2
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	69,87
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Nilai	80
	Indeks kualitas layanan perdagangan (pasar)	Persen	87
	Pertumbuhan usaha perdagangan yang	Nilai	20



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	menggunakan e-commerce/market place		
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei	Persen	100

LKjIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kukar Tahun 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun		
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Rupiah	7,3 T
Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah	Capaian indikator Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah.	Laporan	1
Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Jumlah Indikator SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1



Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

LKjIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kukar Tahun 2024



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100 \%$$



Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Rata-rata target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 sebesar 1.638,94%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Persen	4,10	0,97	23,65	Sangat Rendah
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	Persen	4,30	100	2.325,58	Sangat Tinggi
	Persentase Sentra IKM berbasis	Persen	100	35	35	Sangat Rendah



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
	Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif					
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Persen	2	203,18	10.159,00	Sangat Tinggi
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	69,87	100	143,12	Sangat Tinggi
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Nilai	80	80,92	101,15	Sangat Tinggi
	Indeks kualitas layanan perdagangan (pasar)	Nilai	87	72,27	83,06	Tinggi
	Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/market place	Persen	20	50	250,00	Sangat Tinggi
Rata-rata					1.638,94	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1). Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2024 sebesar 4,10% dan realisasinya 0,97% atau capaian kinerja sebesar 23,65% (*Sumber data dari Bidang Sarana dan Prasarana Sumber daya Industri*). Target kinerja kurang dari target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu 1. Faktor utama sulitnya usaha Industri Kecil Menengah (IKM) berkembang yaitu tidak membuat anggaran bisnis yang tepat, maka perencanaan anggaran yang jelas harus dibuat, seperti mencakup besaran modal, produksi dan investasi. 2. Kurangnya modal usaha bisa menjadi penghambat sulitnya usaha Industri Kecil Menengah (IKM) berkembang



dikarenakan umumnya modal usaha IKM itu mengandalkan kantong pribadi namun modal yang dimiliki terhitung tidak banyak.

2). Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2024 sebesar 4,30% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 2.325,58% (*Sumber data dari Bidang Sarana dan Prasarana Sumber daya Industri*). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi Banyak Industri Kecil Menengah (IKM) yang bisa membuat barang yang berkualitas akan tetapi tidak bisa bertahan dikarenakan kurangnya memasarkan produknya untuk meningkatkan penjualan dan kapasitas produksinya agar tidak stagnan.

3). Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-3” tahun 2024 sebesar 100% dan realisasinya 35% .atau capaian kinerja sebesar 35% (*Sumber data dari Bidang Sarana dan Prasarana Sumber daya Industri*). Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Belum terealisasinya peralatan dan mesin pengolahan.

4). Indikator Kinerja ke-4

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-4” tahun 2024 sebesar 2% dan realisasinya 203,18% atau capaian kinerja sebesar 10.159,00% (*Sumber data dari Dokumen Neraca Perdagangan tahun 2024*). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi Tidak memiliki pelabuhan perdagangan, sehingga pelaku usaha melakukan ekspor di pelabuhan di luar Kutai Kartanegara.

5). Indikator Kinerja ke-5

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-5” tahun 2024 sebesar 69,87% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 143,12% (*Sumber data dari Jumlah Pelaku usaha UMKM yang menggunakan e-commerce/market places*). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi 1. Belum optimalnya pelaksanaan survei lokasi dan sosialisasi kepada aparaturnya wilayah yaitu lurah/kades terkait penetapan lokasi pembangunan toko modern yang sesuai ketentuan berlaku. 2. Terkendala masalah teknis pelaku usaha tidak cukup waktu untuk pengurusan izin tata ruang, PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung) dan SLF (Sertifikat Layak Fungsi).

6). Indikator Kinerja ke-6

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-6” tahun 2024 nilai sebesar 80 dan realisasinya nilai sebesar 80,92 .atau capaian kinerja sebesar 101,15% (*Sumber data dari*



Kuisisioner ttg Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan metrologi). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi 1. Tidak adanya pasar tradisional di beberapa kecamatan sehingga pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayanan tera/tera ulang. 2. Adanya sebagian pemilik timbangan yang tidak ingin melakukan tera/tera ulang terhadap alat ukurnya.

7). Indikator Kinerja ke-7

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-7” tahun 2024 nilai sebesar 87 dan nilai realisasinya 72,27 atau capaian kinerja sebesar 83,06% (*Sumber data dari Survey indek kualitas masyarakat untuk pedagang dan pembeli dan Dokumen Kajian Kualitas Pasar berdasarkan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat*). Target kinerja kurang dari target. Kendala yang dihadapi 1. Belum adanya UPTD pasar 2. Kurangnya kesadaran dari pihak pedagang dalam menjaga kebersihan pasar 3. Belum diterapkannya digitalisasi e-retribusi dan sistem pengelolaan lainnya.

8). Indikator Kinerja ke-8

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-8 tahun 2024 sebesar 20% dan realisasinya 50 % atau capaian kinerja sebesar 250,00% (*Sumber data dari Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan*). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi Kurangnya layanan jasa pengantaran terutama daerah terpencil.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 1.640,07%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 651,73%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 988,34%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2023) secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah	Persen	3,70	14,67	396,49	4,10	0,97	23,65	Menurun



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	
Menengah	Pengolahan Non Migas								
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	Persen	3,80	2,19	57,63	4,30	100	2.325,58	Meningkat
	Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	Persen	100	39,54	39,54	100	35	35	Menurun
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Persen	2	81,82	4.091	2	203,18	10.159,00	Meningkat
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	55,84	91,52	163,90	69,87	100	143,12	Menurun
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Nilai	75	70	93,33	80	80,92	101,15	Meningkat
	Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)	Nilai	82	74,39	90,72	87	72,27	83,06	Menurun
	Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace	Persen	20	56,25	281,25	20	50	250,00	Menurun
Rata-rata					651,73			1.640,07	Meningkat



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024 (%)
Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	3,70	4,10	110,81
Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	3,80	4,30	113,15
Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	100	100	100
Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	2	2	100
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	55,84	69,87	125,12
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	75	80	106,66
Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)	82	87	106,09
Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace	20	20	100

3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Kinerja Program (%)	Capaian Realisasi Anggaran Program (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4-5)
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	1. Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	68,2	93,5	-25,30
	2. Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	65,0	44,3	20,70
	3. Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif				
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	1. Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100	90,2	9,80
	2. Pertumbuhan usaha Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100	93,9	6,10
		Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	98,7	89,6	9,10
		Program Pengembangan Ekspor	97,5	85,0	12,50
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Metrologi	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100	87,5	12,50
	4. Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)				
	5. Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace				

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program	Kegiatan	Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan	Capaian Realisasi Anggaran Kegiatan	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	68,2	93,5	-25,30
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Program Perizinan dan	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	65	44,3	20,70



Pendaftaran Perusahaan				
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	100	87,7	12,30
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100	96	4,00
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba(STPW) untuk penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	100	75,7	24,30
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba(STPW) untuk penerima Waralaba dari Waralaba Luar Negeri	100	99,3	0,70
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	100	94,5	5,50
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya	100	77,1	22,90
Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96	93,8	2,20
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100	88,9	11,10
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	88,6	11,40
Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	97,5	85	12,50
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera ulang, dan Pengawasan	100	87,5	12,50

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1). Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri tahun 2024 yaitu Jumlah dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasinya 1 dokumen atau capaian kinerja sebesar 50%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu:

1. Belum adanya Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) pada pembangunan pabrik minyak makan merah



2. Belum di Perda kannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) karena baru terbitnya RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, dan harus update data terbaru untuk RPIK.

2). Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator kinerja Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional tahun 2024 yaitu Persentase IKM yang masuk dalam SIINAS dengan target sebesar 5 persen dan realisasinya 5 persen atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

1. Belum meratanya jaringan internet di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha dibidang IT.

3). Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator kinerja Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan tahun 2024 yaitu Cakupan Rekomendasi Perijinan Pendaftaran Perusahaan yang dikeluarkan dengan target sebesar 100 persen dan realisasinya 22 persen atau capaian kinerja sebesar 22%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

1. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kurang Untuk jadi rekomendasi (PP. No. 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko) harus dilakukan kegiatan/perjalanan beberapa kali yaitu : menginformasikan/mengantar surat kepada pelaku usaha/perusahaan, survey (untuk melihat keadaan yang sebenarnya dan melihat titik koordinat) dan pembuatan Berita Acara wajib ada yang akan di upload ketika pendaftaran OSS melalui sistem yang sudah ditentukan di DMPTSP)
2. Pihak pelaku usaha (perusahaan/perorangan) kurang menyadari untuk melaksanakan peraturan -Terkendala masalah teknis / pelaku usaha tidak cukup waktu untuk pengurusan izin yang mendukung seperti Tata Ruang dan PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

4). Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan tahun 2024 yaitu:

1. Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola dengan target sebesar 65 persen dan realisasinya 13 persen atau capaian kinerja sebesar 20%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang



dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu tidak ada hambatan dalam pekerjaan.

2. Pertumbuhan Pendapatan Pasar dengan target sebesar 4 persen dan realisasinya 57 persen atau capaian kinerja sebesar 22.800%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu
 - a. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang menghapus Retribusi Tera/Tera Ulang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Realisasi tidak dapat tercapai dikarenakan adanya relokasi Pasar Tangga Arung dengan pembebasan Retribusi Sewa Petak mulai bulan Maret 2024 dan tidak adanya pungutan lagi atas penerimaan Retribusi MCK di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 serta Retribusi Limbah Basah/Kering di Lingkungan Pasar dikarenakan termasuk dalam Pelayanan
3. Indeks Kualitas Pasar dengan target nilai 58 dan realisasi nilai 74 atau capaian kinerja sebesar 127,58%. Target Kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi optimalnya alokasi dana untuk pembenahan sarana dan prasarana, biaya perawatan dan pemeliharaan, pemeriksaan berkala, belum adanya UPTD

5). Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator kinerja Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tahun 2024 yaitu

1. Koefisien variasi harga antar waktu dengan target sebesar 4 persen dan realisasinya 4 persen atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi Barang pokok seperti cabai dan bawang impor dari luar daerah turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar rakyat, penyebabnya bisa keterlambatan jalur distribusi, sirkulasi panen dan faktor cuaca Aksesibilitas yang masih minim di beberapa daerah yang mengakibatkan sulitnya jalur distribusi menyebabkan harga barang lebih tinggi seperti kondisi jalan atau transportasi yang belum memadai.
2. Persentase Pupuk bersubsidi yang diawasi dengan target sebesar 98 persen dan realisasinya 90 persen atau capaian kinerja sebesar 91,83%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi Kurangnya jumlah petugas pengawas dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pemantauan distribusi secara menyeluruh dapat menghambat efektivitas pengawasan, Wilayah yang sulit dijangkau atau tidak memiliki infrastruktur yang memadai dapat menjadi



kendala dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, yang berisiko menyebabkan distribusi tidak merata.

6). Program Pengembangan Ekspor

Indikator kinerja Program Pengembangan Ekspor tahun 2024 yaitu Pertumbuhan ekspor produk unggulan dengan target sebesar 100 persen dan realisasinya 24 persen atau capaian kinerja sebesar 24%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Tidak Memiliki pelabuhan ekspor.

7). Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator kinerja Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen tahun 2024 yaitu Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga dengan target sebesar 28 persen dan realisasinya 39 persen atau capaian kinerja sebesar 139,28% Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi:

1. Adanya sebagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya
2. Ada terdapat kecamatan yang tidak memiliki pasar tradisional sehingga pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayanan tera / tera ulang.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Capaian Program
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	1. Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2 Dok	1 Dok	50%
	2. Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5%	5%	100%
	3. Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif				
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	1. Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100%	22%	22%
	2. Pertumbuhan usaha Persentase pelaku usaha	Program	65%	13%	20%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Capaian Program
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Metrologi 4. Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar) 5. Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4%	57%	22.800%
			58 Nilai	74 Nilai	127,58%
		Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4%	4%	100%
			98%	90%	91,83%
		Program Pengembangan Ekspor	100%	24%	24%
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	28%	39%	139,28%
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Disperindag	Nilai Sakip	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	78 Nilai	48 Nilai	61,53%

3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan/Sub.Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 90,25%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	44,498,729,000	41,609,654,023	93.5
Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	44,498,729,000	41,609,654,023	93.5
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	75,000,000	40,444,200	53.9
Kordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya Industri	200,000,000	134,778,224	67.4
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	41,280,575,000	39,026,270,468	94.5
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2,768,154,000	2,433.001.131	87,89
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	175.000.000	12.090.000	6,9
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	900.000.000	398.454.760	44,3
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	900.000.000	398.454.760	44,3
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data	325.000.000	48.686.600	15,0

LKjIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kukar Tahun 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	250.000.000	46.383.000	18,6
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	325.000.000	303.385.660	93,34
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	325,000,000	293,072,000	90.2
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	75,000,000	65,760,000	87.7
Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75,000,000	67,066,000	89,34
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100,000,000	96,041,000	96.0
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100,000,000	96,041,000	96.0
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	75,000,000	68.851.000	91,80
Fasilitasi pemenuhan komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Penerima Waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui system yang terintegrasi secara elektronik	75,000,000	68.851.000	75.7
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	75,000,000	74,500,000	99.3
Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba lanjutan Luar Negeri yang terintegrasi secara elektronik	75,000,000	74,500,000	99.3
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	15,678,582,000	14,716,985,961	92,94
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15,148,582,000	14,079.662.767	92,94
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	14,948,582,000	13,898.902,767	92,97
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	200,000,000	180,760,000	90.4
Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	530,000,000	446.291.494	84,20
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	250,000,000	177.403.416	70,96
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	280,000,000	268,888,078	96.03
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2,800,000,000	2,508,728,655	89.6
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	425,000,000	398,581,355	93.8
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	125,000,000	115,216,000	92.2
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	175,000,000	164,014,355	93.7
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	125,000,000	119,351,000	95.5
Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	2,000,000,000	1.607.901.600	80.39
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	125,000,000	115,973,000	92.8
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	125,000,000	119,860,000	95.9
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	1,750,000,000	1,372.068.600	88.1

LKjIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kukar Tahun 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	375,000,000	347.413.600	92,64
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	125,000,000	109.618,600	87,69
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	125,000,000	113.360.000	90,68
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	125,000,000	124.435.000	99,54
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2,130,000,000	1,809,541,722	85.0
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,130,000,000	1,809,541,722	85.0
Pameran Dagang Nasional	550,000,000	540,971,337	98.4
Pameran Dagang Lokal	655,000,000	557,406,362	85.1
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	425,000,000	346,582,163	81.5
Peningkatan Citra Produk Ekspor	500,000,000	364,581,860	72.9
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	500,000,000	437,276,305	87.45
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	500,000,000	437,276,305	87.45
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	350,000,000	320,406,305	91.54
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	150,000,000	116,870,000	77.91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28,922,622,606	23,923,561,434	82.7
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	575,123,500	510.886.485	88,83
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	267,623,500	245.323.400	91,66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	157,500,000	119,930,085	76.1
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	150,000,000	145.633.000	97.1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,794,685,951	14,378,598,639	85.6
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,747,823,014	13,588,250,563	86.3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	366,922,137	178.201.012	48,56
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	679,940,800	679,940,800	100.0
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	135,000,000	100,615,000	74.5
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	135,000,000	100,615,000	74.5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	483,000,000	64,326,800	13.3
Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	263,000,000	261.622.000	99,47
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150,000,000	64,326,800	42.9
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	70,000,000	0	0.0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,222,521,000	1,537,529,345	69.2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300,000,000	280.839.050	93,61
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	313,196,000	284,382,000	90.8
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75,000,000	72.667.500	96,89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,125,000	0	0.0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850,000,000	813.490.795	95,70

LKjIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kukar Tahun 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	212,500,000	202.904.000	95,48
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	461,700,000	5.740.000	1,24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,327,393,000	808,422,800	60.9
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117,653,000	106,700,000	90.7
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	640,000,000	598.242.000	93,47
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	319,740,000	309.502.000	96,79
Pengadaan Mebel	250,000,000	217,792,800	87.1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,608,772,377	5,025,716,047	89.6
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,024,000	1.836.000	90,71
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,074,654,867	640.394.839	59,59
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,532,093,510	4,392,981,208	96.9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,776,126,778	1,544,916,050	87.0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	516,710,868	344,123,400	66.6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359,415,910	319,021,500	88.8
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700,000,000	693,131,150	99.0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100,000,000	98,640,000	98.6
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100,000,000	99.320.000	99,32
T o t a l	95.754.933.606	86.418.966.528	90,25

3.8 Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya (2023)

Adapun pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 85,00%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2023)

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.460.000.000	6.589.144.914	69,65
Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	9.460.000.000	6.589.144.914	69,65
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	125.000.000	28.556.500	22,85
Kordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya Industri	525.000.000	293.856.980	55,97
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7.465.000.000	5.804.594.730	77,76

LKjIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kukar Tahun 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.195.000.000	457.496.704	38,28
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	150.000.000	4.640.000	3,09
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	187.796.000	127.382.000	67,83
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	187.796.000	127.382.000	67,83
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	75.000.000	16.159.000	21,55
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	112.796.000	111.223.000	98,61
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	525.000.000	229.674.600	43,75
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	525.000.000	229.674.600	43,75
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	150.000.000	96.781.900	64,52
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	250.000.000	129.622.700	51,85
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	125.000.000	3.270.000	2,62
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	250.000.000	176.298.448	70,52
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	50.000.000	39.778.640	79,56
Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000	39.778.640	79,56
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100.000.000	52.330.000	53,33
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100.000.000	52.330.000	53,33
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	50.000.000	41.860.808	83,72
Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba(stpw) dalam negeri terintegrasi secara elektronik	50.000.000	41.860.808	83,72
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	50.000.000	42.329.000	84,66
Fasilitasi pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba(stpw) terintegrasi secara elektronik luar negeri	50.000.000	42.329.000	84,66
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.205.000.000	6.239.824.161	86,60
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.905.000.000	5.987.929.235	86,72
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.705.000.000	5.788.145.405	86,33
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	200.000.000	199.783.830	99,89
Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	300.000.000	251.894.926	83,96
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	200.000.000	155.535.700	77,77

LKjIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kukar Tahun 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Perdagangan			
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	96.359.226	96,36
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.250.000.000	2.025.246.509	62,32
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	300.000.000	142.562.609	47,52
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.000.000	25.500.000	25,50
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.000.000	8.001.360	81,36
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.000.000	35.702.609	35,70
Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	2.650.000.000	142.562.609	47,52
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100.000.000	30.519.000	30,52
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100.000.000	26.650.000	26,65
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.450.000.000	1.598.124.900	65,23
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	227.390.000	75,80
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	100.000.000	49.805.000	49,81
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	100.000.000	82.640.000	82,64
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	100.000.000	94.945.000	94,95
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.200.000.000	1.085.045.580	90,42
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	1.085.045.580	90,42
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	200.000.000	181.170.320	90,59
Pameran Dagang Nasional	325.000.000	315.901.011	97,20
Pameran Dagang Lokal	200.000.000	198.446.000	99,22
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	175.000.000	168.228.229	96,13
Peningkatan Citra Produk Ekspor	125.000.000	82.870.020	66,30
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	175.000.000	138.430.000	79,10
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	625.390.000	570.911.270	91,29
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	625.390.000	570.911.270	91,29
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	525.390.000	488.766.000	93,03
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	100.000.000	82.145.270	82,15
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	657.375.000	585.418.510	89,05
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	657.375.000	585.418.510	89,05
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	125.000.000	119.742.000	95,79
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	425.000.000	363.715.604	85,58



Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	107.375.000	101.960.906	94,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.737.492.858	23.075.218.292	93,28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	575.123.500	530.907.973	92,31
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	267.623.500	257.575.805	96,25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	157.500.000	138.142.072	87,71
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	150.000.000	135.190.096	90,13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.676.913.420	11.822.328.634	93,26
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.565.249.310	11.710.665.544	93,20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	111.664.110	111.663.090	100
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	135.000.000	81.519.720	60,38
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	135.000.000	81.519.720	60,38
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	337.500.000	155.322.500	46,02
Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	130.369.900	65,18
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.400.000	8.658.700	12,83
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	70.000.000	16.293.900	23,28
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.041.078.176	1.985.791.310	97,29
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	575.000.000	561.308.200	97,62
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.829.000	159.540.900	93,94
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.022.000	183.357.110	97,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	72.677.300	96,90
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.125.000	110.125.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	787.852.176	773.045.600	98,12
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	112.500.000	104.737.450	93,10
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.750.000	21.000.000	96,55
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.542.678.000	2.440.850.000	96,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.229.700.000	1.213.829.700	98,71
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	437.978.000	401.008.500	91,56
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000	89.411.800	99,35
Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	785.000.000	736.600.000	93,83
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.895.209.052	4.621.991.394	94,42
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.024.000	2.004.000	99,01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	508.592.585	78,25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.243.185.052	4.111.394.809	96,89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.533.990.710	1.436.506.761	93,65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	376.808.200	330.372.060	87,68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	457.182.510	414.122.750	90,58

LKjIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kukar Tahun 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	495.651.451	99,13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	98.940.800	98,94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	97.419.700	97,42
T o t a l	48.098.053.858	40.704.164.278	85,00

Dengan demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 5,25%.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 rata-rata sebesar **1.640,07%** (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas sebesar 23,65% (Sangat Rendah).
- 2) Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas sebesar 2.325,58% (Sangat Tinggi).
- 3) Capaian Kinerja indikator Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif sebesar 35% (Sangat Rendah).
- 4) Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor) sebesar 10.159,00% (Sangat Tinggi).
- 5) Capaian Kinerja Indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) sebesar 143,12% (Sangat Tinggi).
- 6) Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi sebesar 101,15% (Sangat Tinggi).
- 7) Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar) sebesar 83,06% (Tinggi).
- 8) Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan usaha Perdagangan yang menggunakan e-commerce/marketplace sebesar 250,00% (Sangat Tinggi).

Capaian kinerja tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 rata-rata capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 651,73% atau terjadi Peningkatan Kinerja sebesar 988,34%

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Merealisasikan segera Pembangunan pabrik dan pengadaan peralatan serta mesin Minyak makan Merah.
- 2) Perlunya Pembangunan Pelabuhan Perdagangan di Kutai Kartanegara, karena selama ini Pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor di pelabuhan di luar Kutai Kartanegara.

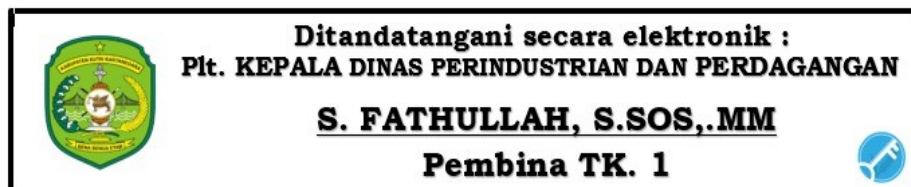


Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

- 3) Perlunya secara berkesinambungan mensosialisasikan penggunaan e-commerce/marketplaces agar lebih memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produknya di took modern.
- 4) Perlunya penganggaran secara bertahap untuk pembenahan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan SNI pasar dan perlunya segera membentuk UPTD Pasar.
- 5) Mengadakan sosialisasi dan rapat internal dengan pelaku usaha/perusahaan terkait sulitnya memperoleh data-data teknis pelaku usaha/perusahaan.
- 6) Perlunya penambahan Sumber Daya Kemetrolagian (penera).
- 7) Perlunya pengawasan dan penyuluhan secara berkesinambungan kepada pemilik alat UTTP, karena rendahnya kesadaran pelaku usaha/pemilik alat UTTP dalam melakukan tera dan tera ulang pada alat ukur yang mereka miliki.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 20 Februari 2025



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA